



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT KERJA DAN RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI II DPR RI DENGAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI RI, KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, DAN
KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA**

Tahun Sidang	: 2023-2024
Masa Persidangan	: V
Rapat ke-	: --
Jenis Rapat	: Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari & Tanggal Rapat	: Rabu, 12 Juni 2024
Waktu Rapat	: Pukul 12.43 s.d. 14.37 WIB.
Tempat Rapat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI / KK.III Gedung Nusantara I DPR RI Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Ketua Rapat	: Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T. (Ketua/F-PG)
Acara Rapat	: Pembicaraan Pendahuluan Pembahasan RAPBN TA 2025, Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 sampai dengan Bulan Mei Tahun 2024
Sekretaris Rapat	: Dahliya Bahnan, S.H., M.H. (Kabag Set. Komisi II DPR RI)
Hadir	: 15 dari 49 orang Anggota dengan rincian: A. ANGGOTA DPR RI PIMPINAN: 1. Saan Mustopa, M.Si. (Wakil Ketua/F-Nasdem) 1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN 4 orang Anggota dari 11 Anggota: 1. Komarudin Watubun, S.H., M.H. 2. Ir. H. Endro Suswantoro Yahman, M.Sc. 3. Drs Cornelis, M.H. 4. Ir. Hugua 2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA 2 orang Anggota dari 7 Anggota:

1. Ir. H. Arsyadjuliandi Rachman, M.B.A.
2. A. A. Bagus Adhi Mahendra Putra, M. H., M. Kn.

3. FRAKSI PARTAI GERINDRA
2 orang Anggota dari 7 Anggota:
 1. H. Rahmat Muhajirin, S.H.
 2. Drs. Difriadi

4. FRAKSI PARTAI NASDEM
3 orang Anggota dari 5 Anggota:
 1. Aminurokhman, S.E., M.M.
 2. Kamran Mochtar Podomi, S.T.

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
0 orang Anggota dari 4 Anggota:
-

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
1 orang Anggota dari 5 Anggota:
 1. Ir. Ongku P. Hasibuan, M.M.

7. FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
1 orang Anggota dari 4 Anggota:
 1. Teddy Setiadi, S.I.Kom.

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
2 orang Anggota dari 4 Anggota:
 1. Drs. H. Guspari Gaus, M.Si.
 2. Khairul Muhtar, S.E., M.M.

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
0 orang Anggota dari 2 anggota:
-

Anggota yang Izin/Sakit:

1. Agung Widyantoro, S.H., M.Si.

B. UNDANGAN

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI
(Rini Widyantini, S.H., MPM/Sekretaris Menteri);
2. Kepala Badan Kepegawaian Nasional
(Drs. Haryomo Dwi Putranto, M.Hum.);
3. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara
(Prof. Dr. Agus Pramusinto, M.D.A.).

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (SAAN MUSTOPA, M.Si., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-P. NASDEM):

Kita mulai ya.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat siang,
Salam Sejahtera buat kita semua,

**Yang terhormat Saudari Sekretaris Kementerian Pan-RB beserta jajarannya,
Yang terhormat Saudara Kepala BKN beserta jajaran,
Yang terhormat Saudara Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara beserta jajaran,
Yang terhormat Bapak/Ibu Anggota Komisi II DPR RI,**

Terlebih dahulu, marilah kita memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Karena hanya atas perkenan-Nya, kita dapat menghadiri rapat Komisi II DPR RI dengan KemenPan-RB, BKN dan KSN dalam rangka menjalankan tugas konstitusional di bidang anggaran, pada hari ini, dalam keadaan sehat *walafiat*.

Sesuai dengan laporan Sekretariat, karena memang kita sudah mulai rapat dari jam 10.00 tadi, pada rapat hari ini, daftar hadir telah ditandatangani mayoritas anggota dan mayoritas fraksi. Oleh karena itu, kuorum telah terpenuhi dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPR RI. Maka, perkenankan kami membuka rapat ini dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 12.43 WIB)

Selanjutnya, kami menyampaikan terima kasih kepada Saudara-Saudara atas kesediaannya memenuhi undangan dalam rapat hari ini. Demikian juga kepada Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI.

Sesuai dengan jadwal atau siklus anggaran yang dikeluarkan oleh Badan Anggaran DPR RI, menugaskan kepada seluruh komisi-komisi agar melakukan rapat dengan mitra kerjanya dalam rangka membahas RKA-KL dan RKP-KL tahun 2025 yang hasilnya nanti akan disampaikan pada Badan Anggaran DPR RI. Oleh karena itu, kami akan menawarkan dan sekaligus meminta persetujuan mengenai acara Rapat Kerja atau Rapat Dengar Pendapat pada hari ini yaitu:

- Pembicaraan Pendahuluan Pembahasan RAPBN Tahun 2025,
- Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, dan
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 sampai dengan bulan Mei tahun 2024.

Setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

Kita akhiri rapat sampai jam berapa? 12.30, 13.30 ya? 13.30. Kalau nanti belum selesai, kita perpanjang.

Bahwa rapat hari ini dalam rangka menjalankan fungsi, salah satu fungsi DPR, yaitu fungsi anggaran. Oleh karena itu, Komisi II DPR RI, ingin mendengarkan penyampaian, penjelasan dalam rangka Pembicaraan Pendahuluan Pembahasan RAPBN Tahun 2025, Rencana kerja tahun 2025 dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 sampai dengan bulan Mei tahun 2024.

Nah, untuk mempersingkat waktu, kami akan mempersilakan kepada Saudara-saudara untuk menyampaikan penjelasannya.

Saya mulai dari Sesmen Kementerian Pan-RB. kami persilakan.

SEKRETARIS KEMENTERIAN PAN-RB RI (RINI WIDYANTINI, S.H., MPM.):

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam salam sejahtera bagi kita semua,

Om swastiastu,

Namo budhaya,

Salam kebajikan,

**Ketua dan Wakil Ketua Komisi II DPR RI,
Para Pimpinan Komisi II DPR RI,
Para Anggota Komisi II DPR RI yang seluruhnya kami hormati, kemudian
Pih., Pak Pit, Kepala BKN beserta jajaran, kemudian
Ketua juga KASN beserta jajaran, serta
Hadirin yang berbahagia,**

Pimpinan,

Pertama-tama, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada seluruh kepada Pimpinan Komisi II dan seluruh anggota Komisi II yang terhormat atas dukungan dan *support* yang tiada henti kepada Kementerian Pan-RB, khususnya untuk *support* terhadap program-program transformasi birokrasi yang telah dilakukan.

Pimpinan yang saya hormati,

Izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Pertama bahwa hari ini kami akan menyampaikan tiga poin:

- Yang pertama adalah mengenai rencana kerja Kementerian Pan-RB Tahun 2025; kemudian, dilanjutkan dengan
- Usulan Tambahan Anggaran untuk Tahun 2025; dan
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 sampai dengan Mei 2024.

Pimpinan dan Anggota Komisi II yang saya hormati,

Saat ini, Pemerintah masih dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Kementerian dan Lembaga untuk Tahun 2025, yang merupakan transisi antara Program Kerja dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2045 dalam program kerja Presiden terpilih. Dalam kerangka program kerja Presiden terpilih, dengan misi *Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045*, telah dijabarkan ke dalam:

- 8 misi Asta Cita,
- 17 program prioritas, dan
- 8 program hasil terbaik cepat atau *quick wins*.

Maka, Kementerian Pan-RB secara spesifik diminta untuk mendukung satu misi Asta Cita adalah untuk memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. Jadi, fokus kita kepada reformasi di bidang birokrasi.

Selanjutnya, bersama dengan Kementerian Bappenas, Kementerian Pan-RB menjabarkan muatan Asta Cita tersebut dalam program prioritas dan beberapa kegiatan prioritas RPJMN tahun 2025, tahun 2009, dan RKP tahun 2025 yang harus dilaksanakan oleh Kementerian Pan-RB.

Demikian di dalam paparan terlihat, ini adalah program prioritas beserta turunannya yang akan menjadi acuan ke depan bagi Kementerian Pan-RB dalam melakukan penyusunan indikator dan target kinerja yang akan dicapai; termasuk program kerja yang mendukung pencapaian target tersebut.

Untuk mendukung Asta Cita yang ketujuh tersebut, terdapat 18 kegiatan yang harus kita Kemenpan, atau kegi, atau KP, yang sejalan dengan tugas dan fungsi kewenangan dari Kementerian Pan-RB, yang akan dilaksanakan oleh seluruh unit kerja ke-deputi-an. Sementara itu, unit kerja sekretariat akan memberikan dukungan dan melaksanakan koordinasi di lingkup internal terkait dengan kegiatan pembangunan tersebut.

Saat ini, Kemenpan-RB sedang dalam proses penyusunan *Grand Design Reformasi Birokrasi* atau GDRBN untuk tahun 2024, 2025, dan sampai 2045, yang akan memuat arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional ke depan. GDRBN, ini akan menyempurnakan upaya-upaya reformasi birokrasi yang telah berjalan saat ini sekaligus *mengakomodir* perubahan lingkungan strategi serta tantangan-tantangan global.

Transformasi digital akan menjadi strategi utama untuk mempercepat terciptanya birokrasi berkelas dunia dalam mendukung visi *Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045*. Hal tersebut tentunya akan dijalankan dengan fokus kepada lima area intervensi yaitu *governance gotech*, yaitu:

- *digital capability*,
- *digital culture*,
- *digital organization* atau *digital structure*,
- *digital process*, dan
- *digital infrastructure*.

Transformasi birokrasi tersebut diharapkan dapat mewujudkan *Human-Base Public Governance*, yaitu birokrasi yang berfokus pada penyediaan pelayanan publik masyarakat yang berbasis siklus hidup manusia dari lahir sampai kematian melalui penggunaan teknologi digital dan pelayanan terpadu.

Bapak/Ibu yang saya hormati,

Selain itu, Kementerian Pan-RB juga sedang menyusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah atau SAKP yang akan menjadi kolan, yang akan merupakan kolaborasi Kementerian Pan-RB, Kementerian Keuangan, Kementerian PPN Bappenas, BPKP, dan berbagai pihak lain.

Melalui SAKP, kinerja instansi pemerintah yang berorientasi institusional menjadi lebih terpadu dalam mencapai *outcome* bersama dalam pembangunan nasional. Melalui SAKP pula, perencanaan dan penetapan kinerja K/L akan dilakukan dengan lebih komprehensif, melibatkan berbagai kementerian lembaga dan ekosistem kolaboratif. Dengan demikian, sasaran pembangunan nasional dapat dicapai sesuai dengan target.

Selanjutnya, kami ingin menyampaikan bahwa transformasi digital Indonesia ini, saat ini memasuki pada tahap *medium term*, yaitu tahun 2025 sampai tahun 2029. Hal ini merupakan tahap lanjutan layanan dasar pemerintah yang akan fokus kepada *digital ID*, *digital exchange*, dan *digital payment*.

Pemerintah sedang mengembangkan portal layanan nasional sebagai portal layanan terpadu yang akan memberikan layanan sesuai dengan perjalanan hidup manusia dari lahir sampai tutup usia. Namun demikian, komitmen Kementerian Pan-RB dalam mengoptimalkan ekosistem pelayanan publik tetap mengedepankan empat pendekatan utama, yaitu integrasi empat ekosistem-ekosistem dalam pelayanan publik yang bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan kualitas layanan kepada masyarakat yang lebih luas.

Selanjutnya, agenda transformasi mengenai Undang-Undang ASN tetap menjadi prioritas. Hal ini untuk mewujudkan birokrasi yang profesional, berkelas dunia. Dengan undang-undang ini, diharapkan indeks persepsi korupsi indeks dan indeks efektivitas pemerintah menjadi semakin lebih baik.

Pimpinan dan Anggota Komisi II yang saya hormati,

Untuk mendukung pelaksanaan program kerja tersebut, berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN, maka Bagian Anggaran Kementerian Aga, MenPan-RB, Kementerian Pan-RB mendapatkan pagu indikatif Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp359.980.127.000,00.

- Alokasi untuk program kebijakan pembinaan profesi dan tata kelola ASN atau program teknis sebesar Rp108.895.320.000,00; dan
- Program dukungan manajemen, atau program dukman, sebesar Rp251.084.807.000,00.

Apabila dibandingkan dengan alokasi anggaran sejak tahun 2022, anggaran Kementerian Pan-RB mengalami kenaikan yang cukup signifikan karena ada tambahan anggaran. Namun, pada tahun 2025 untuk program teknis mengalami penurunan sebesar 38,02%. Sementara untuk dukungan manajemen, mengalami kenaikan sebesar 24,08%. Secara total, pagu indikatif Kementerian Pan-RB tahun 2025 mengalami penurunan sebanyak 4,78%.

Untuk selanjutnya, pagu indikatif itu dialokasikan untuk setiap unit kerja dengan mempertimbangkan urgensi strategi dan kontribusi setiap unit kerja untuk menunjang kinerja Kementerian.

Pimpinan Komisi II dan Para Anggota yang saya hormati,

Dalam merencanakan program kerja dan kegiatan tersebut, Kementerian Pan-RB telah menghitung anggaran yang dibutuhkan. Namun, dengan ditetapkan pagu indikatif saat ini, Kementerian Pan-RB harus melakukan berbagai penyesuaian terhadap rencana kerja tersebut dengan memperhatikan kesenjangan antara kebutuhan anggaran dan alokasi pagu indikatif yang ada.

Maka, Kementerian Pan-RB mengajukan usulan tambahan anggaran sebanyak Rp290.000.162.000,00. Dengan rincian:

- Untuk program kebijakan pembinaan profesi dan tata kelola ASN sebesar Rp220.083.136.000,00; dan
- Program dukungan manajemen sebesar Rp69.917.026.000,00.

Pada program teknis, tambahan anggaran ini akan digunakan antara lain untuk:

- Satu, penyusunan kebijakan koordinasi asistensi evaluasi dan penerapan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas pemerintah;
- Kedua adalah penyusunan kebijakan koordinasi asistensi dan evaluasi serta strategi transformasi pemerintahan digital;
- Yang ketiga adalah penyusunan kebijakan koordinasi asistensi dan evaluasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang inklusif.
- Yang terakhir adalah penyusunan kebijakan, koordinasi, dan pengembangan platform digital ASN dalam upaya transformasi profesionalisme ASN yang berbasis digital.

Pimpinan Komisi II dan Para Anggota yang saya hormati,

Tambahan ang-, tambahan anggaran pada program dukman akan mendukung penguatan kapabilitas organisasi Kementerian untuk mendukung pelaksanaan kebijakan strategis nasional di internal Kementerian Pan-RB.

Oleh karena itu, Kementerian Pan-RB mengharapkan dukungan dari se, dari segenap Pimpinan dan anggota Komisi II yang terhormat, agar kiranya Kementerian Pan-RB diberikan kesempatan untuk mendapatkan tambahan alokasi anggaran sesuai dengan program kerja kami.

Pimpinan dan Anggota Komisi II yang saya hormati,

Wf

Izinkan saya melangkah kepada isu berikutnya, mengenai evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2023 sampai dengan Mei 2024.

Realisasi anggaran Kementerian Pan-RB tahun 2023 sebesar 98,62% atau sebesar Rp315.950.346.358,00 dari pagu total Rp320.334.025.000,00.

Realisasi anggaran untuk tahun 2024 sampai dengan 10 Juni tahun 2024, sebesar 39,64% atau sebesar Rp149.840.466.429,00 dari pagu Rp378.049.699.000,00.

Pelaksanaan kegiatan sepanjang triwulan I dan II ini, sebagian besar merupakan kegiatan persiapan dan koordinasi yang masih dimungkinkan dilakukan secara kombinasi, antara daring atau luring, daring dan luring.

Namun demikian, pada triwulan III dan IV, kegiatan akan lebih banyak bersifat evaluasi ke lapangan ke Kementerian, lembaga, dan daerah. Oleh karena itu, realisasi anggaran akan lebih optimal pada periode tersebut. Dan diharapkan pada akhir triwulan ke-IV dapat tercapai realisasi di atas 95%.

Bapak/Ibu yang saya hormati,

Hasil evaluasi reformasi birokrasi tahun 2023 menunjukkan tren yang terus membaik. 100% kementerian dan lembaga dan 88,2% pemerintah provinsi telah memperoleh predikat RB minimal baik atau (B). Namun demikian pada pemerintah kabupaten/kota, baru 53,15% yang memperoleh predikat RB minimal baik. Dari, dari jumlah tersebut 45% di antaranya masih terkonsentrasi pada Jawa dan Bali.

Salah satu yang menyebabkan nilai RB tidak maksimal, yaitu masih diperlukannya peningkatan komitmen pemerintah daerah terhadap pelaksanaan RB Tematik. Kondisi demikian diperlukan agar upaya yang dilakukan menjadi lebih berdampak pada hasil pembangunan penyelesaian masalah. Demikian juga hasil evaluasi SAKIP tahun 2023 menunjukkan tren perbaikan. Sebanyak 97,6% kementerian dan lembaga dan 100% pemerintah provinsi telah memperoleh predikat minimal baik.

Namun demikian, masih terdapat 22,9 pemerintah daerah dengan predikat di bawah (B). Berdasarkan catatan pelaksanaan zona integritas tahun, pada kurun waktu 2014 sampai 2023, total unit instansi pemerintah yang mendapatkan predikat PBK sebanyak 3.053 unit dan WBBM 585 unit. Sebanyak 59 K/L, atau 70%, telah mendapatkan atau telah memiliki unit zona Integritas.

Namun demikian, tingkat pemerintah daerah baru 97 Pemda atau 17,76% yang memiliki zona integritas. Dan sebarannya masih di domisili, di Bali. Oleh karena itu, di tahun 2025 Kementerian Pan-RB akan mendorong strategi *One Local Government One Zona Integritas*, atau OLGOZI, dengan fokus pada unit kerja pelayanan dasar yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti Dukcapil, DPMPSTP atau RSUD.

Selanjutnya, berkaitan dengan pemerintahan digital. Pencapaian pemerintahan digital di Indonesia terus meningkat. Dari hasil indeks SPBE atau sistem pemerintahan

berbasis elektronik nasional, yang pada tahun 2002 mendapatkan nilai dari 2,34 dengan predikat cukup, menjadi 2,79 dengan predikat baik di tahun 2023. Peningkatan ini berkorelasi positif dengan kenaikan *UN Government Development Index* atau EGD I sebanyak 11 peringkat. Dari peringkat 88 tahun 2020, menjadi peringkat 77 di tahun 2022. Hal ini serupa terjadi pada *Govtech Maturity Index Indonesia*, yang naik dari nilai B di tahun 2020, menjadi A di tahun 2022. Untuk lebih mendorong hal ini, maka pada tanggal 27 Mei tahun 2024, Bapak Presiden Joko Widodo telah meresmikan *Govtech Indonesia* yang akan, yang dinamakan, Ina Digital. Pada tahun 2023 juga-

Bapak dan Ibu sekalian,

Telah diumumkan kebutuhan ASN tahun 2024 sebanyak 2.302.543 terdiri dari 429.183 *front* formasi instansi pusat. 1.867.333 formasi 6, *eh*, formasi instansi daerah dan enam ribu, 6.027 formasi lulusan sekolah kedinasan.

Selanjutnya, terkait program pelayanan publik, selama kurun waktu 23, tahun 2023 sampai 2024, telah terbentuk 216 MPP dan MPP digital yang telah diresmikan atau sekitar 43% dari total kabupaten/kota. Yang mayoritas berada di pulau Jawa sejumlah 93 MPP, disusul Sumatera 50 MPP, Sulawesi 29 MPP, Kalimantan 29 MPP, Bali dan Nusa Tenggara 13 MPP, Papua sejumlah 2 MPP, dan sebanyak 293 kabupaten/kota masih kita dorong untuk segera memiliki MPP.

Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI yang saya hormati,

Demikian penjelasan kami terkait dengan rancangan program dan kerja anggaran Kementerian Pan-RB untuk tahun 2025. Untuk itu, kami mohon dukungan kepada segenap Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI untuk keberhasilan pencapaian program kerja kami guna mencapai agenda pembangunan 2025-2029.

Mengakhiri penjelasan kami, izinkan kami mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada atensi dan segenap Pimpinan, kepada segenap Pimpinan dan Anggota Komisi II RI, atas selalu memberikan *support* kepada Kementerian Pan-RB.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (SAAN MUSTOPA, M.Si., WAKIL KETUA KOMISI II/F-P.NASDEM):

Terima kasih kepada Bu Sesmen Pan-RB.

Berikutnya, Kepala BKN.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (Drs. HARYOMO DWI PUTRANTO, M.Hum.):

Terima kasih, Pak Pimpinan.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat siang,

Salam sejahtera bagi kita semua,

**Yang terhormat Bapak Pimpinan dan Para Anggota Komisi II DPR RI,
Yang saya hormati Ibu Sekretariat, Sekretaris Menteri Pan-RB beserta jajaran,**

Bapak/Ibu yang berbahagia,

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena hanya atas rahmat-Nya kita dapat menghadiri Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR RI.

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih atas dukungan, saran, dan masukan dari Komisi II yang telah disampaikan selama ini. Masukan dan saran tersebut telah kami jadikan sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan program-program BKN selama tahun 2023. Sehingga, program-program BKN dapat terlaksana dengan baik.

Bapak Pimpinan dan Para Anggota Komisi II yang saya hormati,

Sesuai agenda rapat kali ini, kami akan menyampaikan capaian kinerja dan anggaran BKN tahun 2023 serta capaian kinerja dan anggaran tahun 2024 sampai dengan bulan Mei serta Rencana Kerja BKN tahun 2025.

Pada tahun 2023, pagu awal BKN adalah sebesar enam, Rp608.372.344.000,00. Pada bulan Maret tahun 2023, BKN mendapatkan tambahan anggaran untuk pelaksanaan seleksi PPPK teknis formasi tahun 2022 sebesar Rp82.467.806.000,00. Sehingga, pagu BKN menjadi sebesar Rp690.840.150.000,00.

Pada semester 2 bulan Oktober 2023, BKN mendapatkan tambahan anggaran:

- untuk pelaksanaan Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara formasi tahun 2023 sebesar Rp272.382.070.000,00; dan
- pada bulan Desember 2023 mendapatkan sebesar seratus dua puluh empat juta enam puluh, Rp124.062.000.000,00;
- Pada bulan November tahun 2023, BKN mendapatkan tambahan anggaran untuk belanja pegawai sebesar Rp18.670.436.000,00.

Sehingga, pagu akhir Badan Kepegawaian Negara menjadi Rp1.079.227.170.000,00.

Bapak/Ibu yang saya hormati,

Realisasi anggaran BKN pada tahun 2023 adalah 95,43%, yaitu sebesar Rp1.029.852.541.554,00 dari pagu akhir BKN sebesar Rp1.079.227.170.000,00 dengan:

- realisasi program dukungan manajemen sebesar 97,98% atau sebesar Rp536.148.138.926,00; dan
- realisasi program kebijakan pembinaan profesi dan tata kelola Aparatur Sipil Negara sebesar 92,8% atau sebesar Rp493.704.402.628,-.

Realisasi anggaran tersebut belum tercapai secara maksimal dikarenakan adanya tambahan anggaran dari bagian anggaran bendahara umum negara atau BABUN terkait pelaksanaan seleksi calon aparatur sipil negara formasi 2023 yang baru diterima pada akhir tahun, yaitu pada tanggal 31 Oktober 2023 dan 5 Desember 2023, dengan total anggaran Rp396.444.070.000,00.

Bapak Pimpinan dan Para Anggota yang kami hormati,

Sebagai lembaga pemerintah *non*-kementerian, tentu saja BKN ikut mendukung tercapainya program prioritas kerja Presiden yang dijabarkan dalam agenda pembangunan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN tahap IV tahun 2020 sampai dengan 2024. Di mana program kerja BKN mendukung agenda pembangunan terkait revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dengan proyek prioritas revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern dan berkarakter.

Selain itu, program kerja BKN juga mendukung agenda pembangunan lainnya, yaitu memperkuat stabilitas Polhukam dan transformasi pelayanan publik dengan proyek prioritas reformasi birokrasi dan tata laksana.

Terkait dengan pembangunan Ibukota Nusantara, BKN juga mendukung secara langsung arah kebijakan pemerintah dengan kegiatan prioritas pemetaan atau penilaian potensi dan kompetensi bagi ASN yang akan dipindahkan ke Ibukota Nusantara.

Bapak/Ibu yang berbahagia,

Dalam menjalankan rencana kerja tahun 2023, terdapat lima program prioritas nasional yang telah diselesaikan oleh BKN dengan total anggaran empat belas miliar dua ratus delapan puluh juta, Rp14.281.550.000,00.

Realisasi anggaran program prioritas nasional tahun 2023 secara keseluruhan adalah 98,99% yaitu Rp 14.137.270.374,00 rupiah. Dari pencapaian *output* program prioritas nasional ini, secara keseluruhan rincian *output* tercapai 100%. Dan dua di antaranya melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu:

- rincian *output* pemetaan dan penilaian potensi dan kompetensi ASN dengan capaian *output* sebesar 161,27%; dan
- rincian *output* penerapan sistem informasi manajemen kinerja terintegrasi di seluruh K/L dan daerah, dengan capaian *output* 141,12%.

Hal ini menunjukkan bahwa BKN dapat melakukan optimalisasi kinerja program prioritas nasional.

Bapak Pimpinan yang saya hormati,

Kegiatan prioritas nasional pertama berupa revitalisasi sistem rekrutmen ASN dengan target satu sistem informasi telah tercapai. Pada tahun 2023, BKN mendapat amanat untuk melakukan revitalisasi sistem rekrutmen ASN dengan membangun

sebuah portal informasi lowongan kerja ASN untuk *entry level*. Adapun pelaksanaan kegiatan revitalisasi sistem rekrutmen ASN melalui pembangunan portal informasi lowongan kerja ASN, dapat dimanfaatkan sebagai media informasi bagi pencari lowongan kerja untuk calon Aparatur Sipil Negara:

- menyediakan informasi terpusat, khususnya mengenai informasi lowongan seluruh instansi; dan
- menyediakan informasi detail mengenai ketersediaan jumlah formasi jabatan, uraian jabatan, dan besaran tunjangan kinerja atau tunjangan perbaikan penghasilan.

Revitalisasi sistem rekrutmen ASN melalui pembangunan portal informasi lowongan kerja CASN untuk *entry level* telah selesai dibangun pada akhir bulan September 2023 dan telah diterapkan pada portal SSCASN untuk pendaftaran seleksi calon aparat sipil negara formasi tahun 2023.

Yang kedua, pemetaan dan penilaian potensi dan kompetensi ASN. Kegiatan pada rincian *output* ini secara langsung mendukung arah kebijakan pemerintah terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara. Kegiatan ini dilakukan untuk menilai aspek potensi dan kompetensi ASN. Sehingga, diharapkan hasil penilaian potensi dan kompetensi ini dapat dijadikan bahan bagi pemerintah dalam mewujudkan Ibu Kota Negara baru, yang akan menjadi pusat pemerintahan dengan konsep *smart city*.

Pada tahun 2023, BKN telah menyelenggarakan kegiatan pemetaan dan penilaian potensi dan kompetensi dengan jumlah peserta 96.760 Aparatur Sipil Negara. Jumlah ini telah mencapai dan melampaui target 60.000 orang. Tujuan pemetaan dan penilaian potensi kompetensi dalam rangka persiapan pembinaan Aparatur Sipil Negara ke Ibu Kota Nusantara.

Yang ketiga, penerapan sistem informasi manajemen kinerja terintegrasi dengan seluruh K/L dan daerah. Penerapan sistem informasi manajemen kinerja terintegrasi pada seluruh instansi, baik pusat maupun daerah, untuk memudahkan perolehan data kinerja sebagai dasar penerapan manajemen talenta, sistem merit, dan pengisian indeks profesionalitas aparatur sipil negara. Indikator yang dipakai untuk kegiatan prioritas nasional ini adalah jumlah instansi yang telah menerapkan sistem informasi manajemen kinerja, terintegrasi dengan target empat ratus sembi-, 411 lembaga. Pada tahun 2023, BKN melalui Direktorat Kinerja telah melakukan percepatan penerapan sistem informasi manajemen kinerja yang terintegrasi pada 580 instansi. Sehingga, capaian ini juga telah melampaui target yang telah ditetapkan.

Yang keempat, sistem Informasi manajemen ASN dengan target satu sistem informasi telah tercapai. BKN berupaya membangun dan mengembangkan sistem informasi manajemen ASN yang dapat menghimpun dan menghubungkan pengelolaan data kepegawaian secara nasional di dalam satu *database* yang dikelola oleh BKN dan mengkomodir digitalisasi layanan manajemen Aparatur Sipil Negara.

Pelaksanaan kegiatan prioritas nasional pembangunan dan pengembangan sistem informasi manajemen ASN pada tahun 2023 terealisasi melalui beberapa hal, yaitu:

- pembangunan layanan *talent pool* dan portal data; kemudian,

- pembangunan dan penyempurnaan SIASN dengan 19 layanan dan penetapan peraturan BKN Nomor 7 Tahun 2023 tentang Sistem Informasi ASN.

Yang kelima adalah penegakan disiplin ASN dengan target satu rekomendasi kebijakan telah tercapai. Berdasarkan RPJMN tahun 2020 sampai 2024, salah satu masalah yang masih perlu dituntaskan adalah pengelolaan manajemen, manajemen kepegawaian. Di mana masih banyaknya intervensi politik dalam penjatuhan hukuman disiplin pegawai ASN.

Untuk itu, BKN melalui kedepujian pengawasan dan pengendalian mengambil peran dalam menyelesaikan masalah tersebut untuk memberikan standar dan kemudahan dalam melakukan proses pelaporan hukuman disiplin, mulai dari identifikasi sampai dengan pemutus pembuatan surat keputusan hukuman disiplin.

Kegiatan prioritas ini terealisasi melalui beberapa hal, yaitu di antaranya melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap implementasi, norma, standar prosedur, dan kriteria ASN. Di mana BKN telah membangun layanan aplikasi I'DIS versi 2.0 yang telah dibangun dan telah diimplementasikan.

- Kita juga telah melaksanakan beberapa kerja sama yang antara lain dengan:
- Komisi Pemberantasan Korupsi terkait data LHKPN; dengan
 - Kementerian Pan-RB terkait data LHK ASN; dan dengan
 - Badan Narkotika Nasional terkait dengan data penyalahgunaan narkotika;
 - BKN juga telah bekerja sama dengan Bawaslu dengan membangun aplikasi sistem berbagi terintegrasi yang dapat digunakan untuk mengintegrasikan data pelanggaran netralitas ASN.

Dan yang terakhir, merumuskan rekomendasi kebijakan sebagai *output* pelaksanaan kegiatan prioritas nasional penegakan disiplin.

Bapak Pimpinan yang saya hormati,

Kami laporkan bahwasanya pada tahun 2024 ini, BKN memperoleh pagu anggaran sebesar Rp783.765.194.000,00 yang terdiri dari:

- tujuh ratus dua puluh delapan juta, Rp728.707.876.000,00 untuk program dukungan manajemen;
- sebesar Rp55.057.318.000,00 untuk program kebijakan, pembinaan profesi dan tata kelola ASN.
- Pagu tersebut mengalami *automatic adjustment* sebesar Rp27.797.000.577,00.

Sedangkan, untuk realisasi anggaran BKN sampai dengan tahun 2024, terhitung sampai dengan tanggal 31 Mei 2024 berdasarkan aplikasi Spektra, yaitu sebesar 43,94% atau Rp344.411.610.154,00 dengan realisasi anggaran pada:

- program dukungan manajemen sebesar 45,9% yaitu sebesar Rp328.578.934.757,00; dan
- realisasi anggaran pada program kebijakan pembinaan profesi dan tata kelola ASN sebesar 28,76% atau sebesar Rp15.832.675.397,00.

Sehingga, capaian anggaran tersebut telah melebihi rata-rata capaian anggaran secara nasional, yaitu 37,94%.

Bapak/Ibu yang saya hormati,

Pada tahun 2024 ini, BKN mendapatkan amanat untuk melaksanakan empat kegiatan prioritas.

Yang pertama adalah pemetaan dan penilaian potensi dan kompetensi yang merupakan lanjutan dari program tahun 2023 yang dilakukan menggunakan *Computer Assisted Test*. Kompetensi tes CAT dengan target 60.000 ASN dengan pagu anggaran Rp5.500.000.000,00. Target tersebut terdiri dari 40.000 ASN dari instansi pusat yang akan dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara dan 20.000 ASN dari instansi penyangga IKN. Sampai dengan tanggal 31 Mei 2024 telah dilakukan pemetaan penilaian potensi kompetensi pada 14.954 ASN.

Yang kedua, BKN juga melakukan penyusunan standar penilaian potensi dan kompetensi ASN dengan target 1 NSPK dan pagu sebesar Rp2.000.000.000,00. Pada kegiatan prioritas nasional ini, BKN akan mengembangkan berbagai alat ukur berbasis digital dengan target asesori adalah pejabat pimpinan tinggi. Kegiatan yang dilakukan adalah membangun *virtual assessment center* yang dimulai dengan kegiatan penyusunan simulasi *virtual assessment center* berbasis *artificial intelligence*. Yang dalam pelaksanaan penilaian kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi dilakukan secara daring menggunakan *technology natural language processing*, *artificial intelligence*, *machine learning*, dan *blockchain*. Sampai dengan tanggal 31 Mei 2024, *progress capaian output-nya* sebesar 20%.

Yang ketiga, penyusunan rekomendasi kebijakan tentang sistem pengajian pegawai Aparatur Sipil Negara pada instansi pemerintah, dengan target satu rekomendasi kebijakan dan pagu anggaran sebesar Rp1.000.000.000,00.

Kemudian yang keempat, layanan data ASN terintegrasi dengan target satu layanan pada pagu anggaran sebesar Rp2.500.000.000,00.

BKN, melalui Direktorat pengelolaan data dan penyajian informasi, menjalankan program prioritas nasional untuk mewujudkan layanan data dan informasi ASN yang integrasi.

Bapak/Ibu yang saya hormati,

Pada saat ini telah terbit pagu indikatif berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Menteri PPN Bappenas. Pada tanggal 5 April 2024 BKN memperoleh pagu indikatif sebesar Rp798.342.991.000,00. Berdasarkan *re-design* sistem perencanaan dan penganggaran, rencana kerja BKN memiliki dua program yaitu program dukungan manajemen dan program kebijakan pembinaan profesi dan tata kelola aparatur sipil negara.

Untuk program dukungan manajemen alokasi anggarannya sebesar Rp732.914.355.000,00. Dari pagu tersebut sebesar:

- Rp539.112.857.000,00 dialokasikan untuk belanja operasional, belanja pegawai dan pemeliharaan perkantoran; serta
- Rp193.801.498.000,00 untuk belanja *non* operasional, yang terdiri dari:
 - Rp117.775.271.000,00 bersumber dari rupiah murni yang direncanakan untuk barang, bar belanja barang, dan belanja modal; kemudian
 - untuk Rp73.379.798.000,00, yang akan, yang bersumber dari SBSN Surat Berharga Syariah Negara yang akan direncanakan untuk pembangunan dua UPT yang ada di Jambi dan Pangkal Pinang setelah izin prinsip diterbitkan.

Dengan adanya hal tersebut, tentu BKN akan mendorong dan meningkatkan pendekatan pelayanan khusus di bidang kepegawalan kepada masyarakat.

- Selanjutnya, sebesar Rp 2.646.429.000,00 yang berasal dari PNBPN direncanakan akan untuk pembelian sarana dan prasarana penunjang seleksi pada unit penghasil PNBPN, yaitu:
 - pusat penilaian kompetensi;
 - pusat penyelenggaraan sistem seleksi; dan
 - pusat pengembangan pegawai aparatur sipil negara.

Untuk program kebijakan pembinaan profesi dan tata kelola ASN, alokasi anggaran adalah sebesar Rp65.428.636.000,00. Dari pagu tersebut, BKN mendapatkan alokasi anggaran sebesar:

- Rp54.724.729.000,00 yang berasal dari rupiah murni;
- Yang besarnya Rp10.703.907.000,00 yang bersumber dari PNBPN, yang akan digunakan untuk kegiatan pada unit penghasil PNBPN.

Bapak/Ibu yang saya hormati,

Terkait Program Prioritas Nasional Tahun 2025 tersebut, BKN mendapatkan amanat untuk melaksanakan top, tiga program prioritas:

- Yang pertama, penyusunan rekomendasi kebijakan *roadmap*, penerapan sistem pensiun dengan target satu rekomendasi kebijakan;
- Yang kedua, *database profile* ASN yang, yang dengan target satu layanan dalam rangka mendukung implementasi manajemen talenta aparatur sipil negara; dan
- Yang terakhir, pengawasan dan pembinaan rekomendasi penindakan atas pelanggaran penerapan prinsip sistem merit dalam manajemen aparatur sipil negara.

Bapak/Ibu yang saya hormati pada forum yang terhormat ini,

BKN mengusulkan tambahan anggaran di tahun 2025 sebesar Rp59.465.000.087,00. Kebutuhan tambahan anggaran ini, dikarenakan adanya penambahan pegawai dari KASN ke BKN dan rencana penambahan pegawai calon aparatur sipil negara tahun 2024.

Demikian, Pimpinan dan Para Anggota yang kami hormati.

KETUA RAPAT (SAAN MUSTOPA, M.Si., WAKIL KETUA KOMISI III/F-P.NASDEM):

Terima kasih pada Kepala BKN.

Berikutnya, Ketua KASN.

KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA (PROF. DR. AGUS PRAMUSINTO, M.D.A.):

Terima kasih.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat siang, dan

Salam sejahtera untuk kita semuanya.

**Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI,
Ibu Sesmen KemenPan-RB dan jajaran,
Kepala BKN RI dan jajaran, serta
Hadirin yang berbahagia,**

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT di mana hari ini kita semua sehat dan mudah-mudahan selalu dalam lindungannya. Dan kita bisa hadir pada acara Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, dan juga Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 sampai dengan Bulan Mei.

Tahun 2024 ini merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan RPJMN, 2020 sampai dengan 2024. Dan KASN turut mendukung agenda prioritas Presiden, yakni untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa yang berdasarkan hukum secara birokrasi yang profesional dan netral. Dan kami punya fungsi untuk mengawasi penerapan sistem merit.

Dan pada kesempatan ini, izinkan kami untuk menyampaikan realisasi anggaran dan juga capaian kinerja KASN tahun 2023 dan 2024 sampai dengan bulan Mei.

Dalam catatan kami, sampai dengan 31 Desember 2023, persentase penyerapan KASN, anggaran KASN mencapai 97,78% dengan realisasi anggaran Rp52.607.509.465,00.

Terkait dengan capaian kinerja *output* utama KASN tahun 2023, dapat kami sampaikan berikut.

Pertama, capaian kinerja pengawasan penerapan sistem merit pada instansi pemerintah, yakni 314 instansi pemerintah telah mendapatkan kategori baik ke atas, dari 216 instansi pemerintah yang ditargetkan. Dan kami fokus pada kabupaten/kota sebagai penyumbang terbesar.

Selanjutnya, terkait dengan pengawasan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi pada tahun 2023, KASN telah menerbitkan sebanyak 3007 rekomendasi dengan nilai indeks kualitas seleksi terbuka sebesar 82,13 yang mencapai kategori baik atau 96% dari 86 nilai indeks yang ditargetkan tahun 2023.

Dalam rangka pengawasan pelanggaran Sistem Merit terdapat sebanyak 201 laporan pengaduan yang merupakan kewenangan KSN dan 111 dinyatakan terbukti sebagai pelanggaran sistem merit dan mendapatkan rekomendasi KSN. Dan ada 92 atau 83% rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh BPK.

Selanjutnya dalam rangka memastikan instansi pemerintah menerapkan nilai dasar kode etik dan kode perilaku pegawai ASN, RPJMN menargetkan 630 instansi pemerintah. Pada tahun 2023, capaian KSN telah berhasil melebihi target yakni sebesar 636 instansi pemerintah atau 100,10%.

KASN juga melakukan pengawasan represif dengan menerima pengaduan pelanggaran nilai dasar kode etik dan kode perilaku pegawai ASN. Dari seratus tujuh puluh enam, 178 ASN yang dilaporkan, terdapat 108 ASN tidak terbukti melanggar. Sedangkan, 43 ASN atau 28%-nya mendapatkan rekomendasi dari KASN dan saat ini sudah ada 63% rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh PPK.

Pada tahun 2023, menjelang pelaksanaan Pemilu tahun 2024, KASN menerima 262 ASN yang dilaporkan atas dugaan pelanggaran netralitas ASN. Sebanyak 259 atau 99% laporan pengaduan tersebut telah diselesaikan. Dan 141 ASN, atau 54% di antaranya, terbukti melanggar netralitas dan telah diterbitkan rekomendasi. Saat ini, ada 98 ASN, atau 70% di antara rekomendasi tersebut, telah ditindaklanjuti oleh PPK.

**Pimpinan dan Anggota Komisi II, serta
Hadirin yang kami hormati,**

Berikutnya, kami sampaikan terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi KASN tahun 2024 sampai dengan bulan Mei. Tahun 2024 ini merupakan tahun yang cukup berat dan penuh tantangan bagi KASN dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

KASN mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp88.592.207.000,00. Namun, pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dan adanya kebijakan blokir *automatic adjustment* oleh Kementerian Keuangan, hal ini berdampak pada diblokirnya anggaran *non-operasional* KASN sebesar Rp43.795.914.000,00 atau sekitar 49,4% dari alokasi anggaran tahun 2024. Adapun anggaran yang tidak diblokir yaitu belanja operasional dengan alokasi anggaran sebesar Rp37.407.441.000,00.

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi KASN, sesuai dengan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang ASN di mana KASN telah, masih melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ASN telah dilakukan buka blokir oleh Kementerian Keuangan dan disepakati penggunaannya untuk kegiatan bulan Januari sampai April 2024. Sampai dengan 10

Juni 2024, realisasi anggaran pelaksanaan tugas dan fungsi teknis yang bersumber dari anggaran buka blokir sudah mencapai 96,95%.

Sedangkan, untuk realisasi keseluruhan anggaran satker KASN adalah sebesar Rp25.534.999.876,00 atau sebesar 57%.

Pimpinan dan Anggota Komisi II yang kami hormati,

Selanjutnya, kami sampaikan pembahasan terkait Capaian Kinerja *Output* Utama KASN Tahun 2024 sampai dengan 31 Mei 2024.

- Pertama adalah jumlah instansi pemerintah dengan kategori sistem merit baik ke atas adalah 311 instansi pemerintah atau 115% dari yang ditargetkan.
- Yang kedua jumlah rekomendasi pengawasan pengisian jabatan pimpinan tinggi berjumlah 1.114 rekomendasi atau 394%. Karena, banyak dari instansi pemerintah daerah yang mengajukan pengisian JPT, baik itu seleksi terbuka maupun rotasi mutasi, menjelang pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2024.
- Yang ketiga, instansi pemerintah yang telah memiliki peraturan kode etik dan kode perilaku adalah 636 instansi pemerintah. Di sini memang tidak terjadi peningkatan, karena tidak ada alokasi pada anggaran yang buka blokir.
- Yang keempat dari rekomendasi dari 202 rekomendasi pelanggaran netralitas ASN, terdapat 67 atau 43% yang ditindaklanjuti oleh PPK. Sedangkan dari 11 rekomendasi pelanggaran nilai dasar kode etik dan kode perilaku, terdapat 4 ASN yang ditindaklanjuti oleh PPK. Demikian juga dari rekomendasi, 23 rekomendasi pelanggaran Sistem Merit, terdapat 14 atau 61% rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti oleh PPK.

Berdasarkan *monitoring* tindak lanjut rekomendasi pada tahun sebelumnya, tren tindak lanjut rekomendasi KASN akan meningkat pada akhir tahun.

Pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, KASN bersama dengan KemenPan-RB dan BKN telah melakukan persiapan rencana peralihan Personil Perlengkapan Pembiayaan dan Dokumen atau P3D.

Sesuai Surat Menteri Pan-RB Nomor 75/MKP04.00 Tahun 2024 tanggal 7 Maret 2024 di mana substansinya, "Terhitung TMT 1 Juni 2024, pegawai DPK di lingkungan KASN dikembalikan ke instansi asal." Sehingga, 6 pegawai yaitu 3 asisten KASN dan 3 Pejabat Struktural, sudah ditarik oleh instansi asal dan mutasi ke instansi lain. Sedangkan, 15 Pegawai DPK lainnya menunggu jadwal penarikan resmi oleh instansi induk.

Kondisi tersebut tentu berdampak pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KASN, yang kemudian menjadi terhambat serta menjadi terjadi kekosongan jabatan pada level *middle management*. Sementara pada sisi lain, instansi pemerintah atau *stakeholders* selalu meminta dilakukan pengawasan dan penilaian sistem merit oleh KASN. Begitu juga dengan pengawasan nilai dasar, kode etik, kode perilaku dan netralitas pegawai ASN.

Dan untuk tahun 2025, kami tidak mengajukan anggaran, karena memang nafas hidup KASN tinggal menghitung hari, kami masih menunggu Perpres.

Tentu saja, terima kasih atas kerja sama selama ini. Dan tentu saja, kami mohon maaf kalau ada kekurangan, kalau ada tindak tanduk yang kami lakukan tidak berkenan kepada Bapak/Ibu sekalian.

Selanjutnya, izinkan kami menyampaikan beberapa tantangan pemerintah ke depan, pasca diterapkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, di antaranya adalah:

- Pertama, perlu kejelasan pengawasan oleh lembaga lain, kapan dimulai. Karena, jelang Pilkada banyak konflik di daerah, terutama antara sekda dengan kepala daerah serta terjadi pelanggaran netralitas ASN yang sangat masif.
- Kedua, setelah tidak ada penyebutan seleksi terbuka pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, terdapat kekhawatiran tentang tata cara pengisian jabatan di saat aturan terkait manajemen talenta belum disiapkan. Ini pertanyaan yang kami tidak bisa jawab oleh berbagai instansi, terutama di daerah.
- Yang ketiga, setelah tidak adanya KASN harus dipastikan lembaga yang mengasesi siap dengan kerja cepat dalam menangani pelanggaran yang terjadi dalam manajemen ASN dan tentu saja netralitas pegawai ASN.

**Pimpinan dan Anggota Komisi II, serta
Peserta Hadirin yang kami hormati,**

Demikian kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang dalam penyampaian paparan ini.

Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas dukungan Pimpinan dan juga Anggota Komisi II yang merupakan mitra kerja KASN yang luar biasa.

Kami berharap penerapan Manajemen ASN berbasis Sistem Merit tetap *on the track* sehingga mampu meningkatkan kualitas manajemen ASN di Indonesia dan mewujudkan ASN berkelas dunia.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (SAAN MUSTOPA, M.Si., WAKIL KETUA KOMISI II/F-P.NASDEM):

Terima kasih, Ketua KASN.

Ini *nih* memang KASN *nih* agak ini *nih*. Karena, PP terkait dengan Undang-Undang ASN ini kan belum terbit juga sampai hari ini, ya, dan harusnya April sudah

selesai. Ini sudah masuk Juni, sudah lewat dua bulan. Sementara, KASN organisasi ini-nya kan harus jalan terus. Jadi, ketidakpastian ini tentu juga menimbulkan banyak persoalan ya, termasuk tadi itu soal pemblokiran anggaran.

Total pemblokiran anggaran KASN itu hampir 50% kalau ditotal, ya, akibat dari, apa, terbitnya Undang-Undang 20 2023 itu. Kan, begitu undang-undang ini terbit langsung dia blokir. Dan itu sebesar 21 milliar lebih diblokir akibat undang-undang itu. Pemblokiran akibat *automatic adjustment* 22 milliar lebih. Total diblokir itu 43 milliar. Sementara dari pagu anggaran, ya.

Jadi, yang bisa digunakan hanya 44 milliar-an dan tentu ini, ini penting nanti untuk kita bahas. Ini kan begitu. Untuk kita ini kan dalam pembahasan lebih ini lagi. Karena kalau enggak, banyak konsekuensi yang akan diterima.

Sementara, tugas KASN bukan hanya soal operasional, apa ini, tapi juga kan masih ada tugas-tugas lain terkait dengan soal *merit system*. Kan begitu loh. Jadi, PP-nya belum terbit juga, sanksinya sudah dapat itu. Jadi, ini, ini, ini problem menurut saya yang nanti harus kita sama-sama, apa, bukannya dalam, tapi kita selesaikan Pak Daus. Jadi, harus kita selesaikan.

Jadi, ini, ini penting apalagi nanti *nih* ada Pilkada. Sekarang, Pilkadaanya juga kan serentak nasional. Kita bisa bayangkan belum apa-apa di daerah itu Sekda sama Bupati maju. Ah ribut dia, kan begitu. Turunannya banyak sekali itu nanti pada saat nanti rekrutmen jabatan-jabatan pasca Pemilu juga. *Nah*, nanti siapa yang akan menjaga-in itu semua? Kan begitu loh.

Jadi, dulu kenapa sebenarnya banyak yang agak keberatan ini di-, dibubarkan. Tapi, ya, DPR kan tahu sendiri kan, Pak Hendro kan, ini suruh di, ini katanya kan dari sananya ini bagaimana. Jadi kenapa kita dulu agak bertahan itu supaya ini tidak di-, dibubarkan, karena kita masih melihat banyak persoalan di daerah. Begitu loh. Masih banyak persoalan di daerah.

Tapi, ini kan sudah jadi. Undang-Undangnya sudah ada. Faktanya, ini sudah enggak ada lagi. Tapi, PP-nya telat turun. Ini juga menjadi persoalan lagi. Jadi, nanti sekali lagi kita selesaikanlah nanti di saat pembahasan. *Nah*,

Ibu/Bapak sekalian Anggota Komisi II DPR RI,

Kita sudah mendengarkan semua, ya, penjelasan dari MenPan-RB, kan itu loh lewat Sesmennya. Kita sudah mendengarkan penjelasan dari Kepala BKN dan kita juga sudah mendengarkan penjelasan dari Ketua KASN.

Nah, untuk itu saya persilakan anggota untuk mendalami terkait dengan penjelasan-penjelasan tersebut.

Nah, kita perpanjang sampai jam 14.00 ya? Enggak boleh lewat dari itu.

Silakan Pak Gaus, Pak Hugua, Pak Kamran, Pak Bagus sama Pak Amin.

Silakan Pak Guspari Gaus. Singkat padat dan jelas.

F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**Pimpinan dan Anggota Komisi II yang saya hormati,
Bapak/Ibu dari MenPan-RB, BKN dan KASN,**

Saya sudah menelaah kertas kerja yang Bapak/Ibu sampaikan dan juga menyimak apa yang dipaparkan.

Pertama, ke MenPan-RB. Anggaran 2023, anggarannya adalah 320 M lebih, capaiannya realisasi 98,62%. Ini saya memberikan apresiasi. Dari 14 mitra kami, kementerian dan lembaga, ini urutan keempat capaian anggarannya. Luar biasa. Kita berikan apresiasi.

Kemudian yang kedua, KASN 2023. Walaupun tadi dikatakan keluh kesah, saya juga ungkapkan, tadi Pimpinan juga sudah sampaikan, keberadaan daripada KASN. Tapi namun di tahun 2023 itu cairan atau realisasi anggarannya cukup menggembirakan 97,78% dari anggaran delapan puluh, dari anggaran 53 M lebih. Realisasinya 97,78% itu dari 14 kementerian dan lembaga termasuk luar biasa. Peringkat keenam, saya lihat.

Jadi, saya catat semua ini, Pak. Ini ada referensinya, mana yang *the best*. Yang paling bagus itu adalah LAN, ANRI, dan seterusnya.

Kemudian, BKN saya sangat memprihatinkan. Capaiannya hanya 95,43%. Di urutan ke-12 dari 14. Sama dengan Ombudsman tadi pagi, yaitu di urutan ke-10. Tentu, saya minta kepada BKN yang memang anggarannya tambahan di semester II. Tadi dikatakan, ada tambahan sebanyak 396 M dari anggaran awal 608 M.

Tentu, saya ingin juga menanyakan. Apakah tidak ada pembukaan CPNS pada tahun 2024 ini? Karena tadi dikatakan, kenapa terjadi anggaran tambahan di 2023 itu, di semester II, yang nilainya separuh dari pagu anggaran awal. Saya dengar-dengar kalau enggak salah, ada kebijakan pemerintah. Enggak tahu siapa. Pelaksanaannya itu di 2023. Kemudian, realisasinya bagaimana?

Kalau memang, kami, kami pun juga, saya pun juga kaget ini tentu, tanpa melalui Komisi II tambahan anggaran Semester II itu. Saya merasakan, rasanya tidak pernah, yang tidak hadir dalam rapat tambahan anggaran di BKN. 396 pada semester II itu terjadinya bagaimana? Apakah atau saya luput atau saya memang tidak hadir? Sehingga, kaget juga saya ini ada tambahan anggaran yang sekian. Tapi, peruntukannya sangat jelas yaitu dalam rangka pelaksanaan kegiatan CPNS.

Tadi juga sudah disinggung oleh Pimpinan, tapi belum menjurus kepada MenPan-RB yang ditugaskan oleh undang-undang. Ini sudah teledor ini. Saya juga ditanya oleh berbagai *mass media* terhadap kewajiban BK, *anu*, MenPan-RB untuk melahirkan PP berkaitan terhadap kebijakan di mana KASN, sebagai lembaga yang

melakukan pengawasan, itu sudah *diliminir* akibat dari lahirnya Undang-Undang 22, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023.

Oleh karena itu, tentu saya minta juga bagaimana progres *report* karena dijanjikan di bulan April. Sebab, Desember itu tidak ada lagi persoalan-persoalan yang berkaitan terhadap masalah honorer dan juga status daripada lembaga pengawas ini. Memang kita dulu, sebagaimana dibilang oleh Pimpinan, kita berjibaku dan lain sebagainya. Tetapi, inilah sebuah kebijakan dan keputusan yang diambil, tentu kita harus *sami'na wa atho'na*.

Harusnya dalam persoalan ini MenPan-RB juga harus paham, kita sedang menghadapi Pilkada serentak yang belum pernah dilakukan selama ini. Artinya, dinamika berkaitan tentang netralitas ini sangat-sangat luar biasa. Bayangkan saja kemarin, Pemilu 14 Februari 2024, di mana secara *sumringah* keberanian ASN untuk tidak netral.

Lembaga apalagi yang akan mengawasi? Sedangkan, PP untuk berkaitan tentang persoalan itu sampai detik ini juga belum lahir. Ini *bengkalai*, yang menurut hemat saya, tolonglah segera dilahirkan. Karena, kita melahirkan undang-undang ini di 2023. Sampai sekarang sudah bulan Juni, sudah lebih enam bulan, kok masih belum juga terlaksana?

Kemudian, yang terakhir adalah termasuk juga MenPan-RB, progres *report*. Makanya, pendalaman nanti saya bicara anggaran karena kita jarang-jarang bicara, dulu dengan Pak Tjahyo Kumolo kita sering. Progres *report* daripada *eselonisasi* ini gimana?

Saya hanya mendapatkan ketika itu pada zaman Pak Tjahyo Kumolo. Sudah ada gambaran-gambaran dasar yang disampaikan di pusat. Tentang masalah eselon III dan IV, kinerjanya begini. Provinsi bagaimana. Kabupaten/kota dan juga bagaimana. Sebab, ini juga menimbulkan masalah, masalah baru. Ada kebutuhan-kebutuhan di *grass root* itu memerlukan Eselon IV.

Nah, bagaimana? Dan tidak mungkin dilakukan oleh lembaga yang bersifat fungsional. Oleh karena itu, saya selalu mengatakan bahwa persoalan *eselonisasi* itu bukan menghilangkan, menghapuskan, tetapi melakukan rasionalisasi terhadap jabatan Eselon III dan IV itu. Tentu ini juga perlu pemikiran, pendalaman kajian yang lebih mendalam dalam melakukan rasionalisasi itu. Jangan hantam kromo saja. Jadi, kasihan juga.

Kemudian, yang ter-, yang *anu*-nya itu, adalah masalah fungsional. Dulu sering juga dikatakan oleh MenPan-RB ini, bahwa anggarannya malah lebih membengkak. Saya enggak, enggak masuk akal itu. Dengan adanya di, dirasionalisasikannya Eselon III dan IV, terjadi pembengkakan.

Kalau saya mengatakan, malah menurunkan anggaran. Kenapa? Ruang kantor untuk Eselon III tidak ada lagi, biaya operasionalnya tidak ada lagi, kemudian apa, pangkatnya apa? Jabatan, jabatannya kan tidak ada lagi jabatan. Jabatan Eselon III Eselon IV itu kan ada yang diberikan apresiasi oleh Pemerintah. Apa namanya? Tunjangan jabatan, bukan kinerja. Tunjangan Jabatan. Artinya, tunjangan jabatan

tidak ada, kantor juga tidak ada, biaya operasional terhadap jabatan eselon III dan IV juga tentu hilang.

Apakah benar sinyalemen yang dikatakan malah dengan dilakukan pemindahan dari rasio dari Eselon III, IV kepada fungsional menjadi membengkak? Atau ini hanya karena masa transisi, karena belum jelasnya?

Ini juga merupakan PR bagi MenPan-RB, mau diapakan fungsionalisasi itu? Sebab, fungsionalisasi itu, Eselon III dan IV itu, dia kan beragam jabatan. Dia sekarang jadi setara. Ini juga perlu di-anu, di-*manage* sedemikian rupa. Bagaimanapun dia pernah jadi pimpinan, sekarang dia tidak, sudah fungsional. Antara Eselon III dan IV tentu jauh berbeda.

Kemudian KASN, ini saya kasihan ini. Memang betul apa yang disampaikan oleh Kang Saan, Pimpinan. Anggarannya sudah diblokir sedemikian rupa. Padahal, ini belum *anu*. Barangkali ini juga bagian kesimpulan yang perlu juga kita berikan apa penelaahan. Atau paling tidak meminta kepada Menteri Keuangan untuk yang diblokir itu, yang kebutuhannya itu, tentu perlu juga kita apresiasi.

Barangkali demikian, Pimpinan.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (SAAN MUSTOPA, M.Si., WAKIL KETUA KOMISI II/F-P.NASDEM):

Terima kasih, Pak Guspari Gaus.

Silakan, Pak Hugua.

F-PDIP (Ir. HUGUA):

Baik.

Terima kasih, Pimpinan.

**Kawan-kawan Anggota,
Bapak-bapak dari BKN, Pan-RB, Kementerian Pan-RB dan KASN,**

Pertama, saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas kinerja, rata-rata di atas 95 ke 97 untuk semua mitra hari ini. Dan pada hingga bulan Juni ini rata-rata juga pengeluaran sudah mencapai kurang lebih 30%. Saya kira ini patut kita hargai di tengah-tengah kondisi Pemilu dan seterusnya. *Dinamisasi*, pelaksanaan tugas-tugas di kementerian dan lembaga masing-masing dinamis.

Karena ini hari kita bicara tentang pagu indikatif, yang otomatis nanti kita lanjutkan dengan konsinyering lalu pagu definitif, kita berharap bahwa, Bapak/Ibu sekalian, kita mudah-mudahan dari anggaran yang ada ini, bisa kita tingkatkan.

Namun, ada beberapa hal yang pada saat satuan tiganya nanti Pak, saya minta dipertegas.

Pertama, kepada Pan-RB dan BKN. Coba kalau bisa Pak, dibuat satu program di satuan tiganya berkaitan dengan kajian efektivitas fungsionalisasi jabatan struktural Eselon III dan IV ini.

Karena sebetulnya, kalau kita bicara fungsional ini kan berkaitan dengan kredit-kredit, angka kredit itu. Dan sampai hari ini PP-nya atau Juknisnya kurang jelas di daerah. Akhirnya, di-, kita minta hasil kajian itu dilaporkan ke kami di DPR tentang, apa namanya, apa sih sebetulnya manfaat atau kemajuan apa yang dicapai negara dengan fungsionalisasi dari beberapa jabatan struktural ini?

Karena ini hampir megap-megap, tidak lagi bunyi. Kedengaran, tetapi apa? Apakah ini justru efisien tapi justru kembali ke-apa, masih seperti yang dulu? Yang dulu ada struktur, ada bosnya lalu turun. Tapi sekarang, fungsionalisasinya terpisah-pisah. Diikat-ikat saja.

Ini penting sekali, sebab kalau tidak nanti kinerja justru tidak maksimal. Justru saling berharap, saling mengharapkan pada tugas-tugas yang sebetulnya tidak punya atasan langsung yang bisa me-kondulte. Karena kalau kita bicara fungsional, kan kita bicara tentang bukan struktur dia. Dia lebih pada ikatan-ikatan saja dan lemah ikatannya. Begitu lemah ikatannya, kinerja tidak bisa terukur. Satu.

Yang kedua Pak, sebetulnya ada satu, terutama di Kementerian Pan-RB dan BKN ini juga. Coba dicocokkan kembali nomenklatur jabatan, klasifikasi jabatan, terutama fungsional di Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pan-RB atau BKN ini.

Saya dengar dari kata kawan-kawan kesehatan banyak sekali benturan-benturan di sana. Salah satu korbannya adalah 690 Bidan Ahli, D-IV pada penerimaan PPPK tahun 2023 ini. Pembatalan NIP. Gila ini, Pak. Orang yang sudah tes, lolos, 690 orang seluruh Indonesia D-IV, tiba-tiba dianulir dan NIP-nya tidak bisa diterbitkan. Setelah kita cari katanya, ini katanya, tapi tolong dilaporkan juga dan mungkin bisa dijawab pada tahun, walaupun ini penyusunan anggaran. D-IV ini dianggap tidak sesuai dengan Surat Edaran Menteri Kesehatan. Pertanyaannya, kenapa sampai BKN mengumumkan dan memproses tes? 690 orang lulus, tiba-tiba dianulir NIP-nya. Ini kan gila namanya. Orang yang sudah tes lulus, dianulir. NIP-nya enggak keluar. Nah,

Bapak/Ibu sekalian,

Tolong kasih kami keterangan, kenapa ini bisa terjadi?

Katanya, informasinya, kan saya ketemu dengan perwakilan mereka. Katanya, akan dikasih afirmasi. Oke, bagus. Untuk memperbaiki dosa, afirmasi bagus. Tetapi Pak, tolong juga karena mereka ini kan tes kemarin itu. Syarat undang-undang mereka sudah lewati tes. Syarat undang-undang itu. Baik Undang-Undang Nomor 5 dulu sama Undang-Undang Nomor 20 2003 ini, syaratnya tes. Kalau dikasih afirmasi, apakah mereka ini dites lagi? Berapa kali tes?

Harusnya kan tidak perlu lagi dites, mereka ini. Tinggal persyaratan saja. Karena apa, Pak? Bu? Tes itu persyaratannya harus melengkapi surat-surat yang nilainya jutaan juga. Mereka ini kan pencari kerja. Jadi, kalau surat kelakuan baik, surat persyaratan dokter, dari Kepala Desa, macam-macam harus diulangi lagi, kan mereka harus mengeluarkan uang jutaan lagi untuk hal itu.

Oleh karenanya, maka, kalau toh afirmasi, maka mereka ini tolong diperhatikan serius dan anggaran tahun ini kalau belum tercakup di anggaran tahun ini, tahun 2024 ini, maka 2025. Ini karena menyelesaikan dosa. Karena, ini juga kan kewenangan APBD sebetulnya. Tinggal bagaimana BKN dan Kementerian Pan-RB itu menyurat ke para bupati, wali kota, dan gubernur seluruh Indonesia tentang hal-hal ini. Sehingga, mereka usulkan kembali dalam APBD mereka.

Tetapi, di dalam anggaran Pan-RB maupun BKN ini dianggarkan untuk perjalanan, koordinasikan, surat-suratkah? Atau pertemuan-pertemuan yang pada kawasan-kawasan yang memang berkaitan dengan pembatalan sebanyak 690 orang ini.

Saya kira itu pimpinan.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (SAAN MUSTOPA, M.Si., WAKIL KETUA KOMISI II/F-P.NASDEM):

Terima kasih, Pak Hugua.

Silakan, Pak Kamran.

F-P. NASDEM (KAMRAN MUCHTAR PODOMI, S.T.):

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Shalom,

Pimpinan yang saya hormati dari Kementerian Pan-RB, BKN dan KASN,

Pertama, tentu apresiasi ya. Seluruh Anggota ini mengapresiasi karena serapan anggaran dari Kementerian Pan-RB ini di atas 98 ya. Ada lebihnya. Kemudian, KASN juga 97 koma sekian. BKN 95 koma sekian.

Pada prinsipnya, hal ini kita pandang sebagai sesuatu yang sifatnya positif. Namun demikian, ada beberapa hal yang perlu kami tanyakan, ya, terkait dengan pelaksanaan khususnya untuk BKN ini. Penerimaan PPPK dan ASN tahun-tahun lalu.

Ada di satu daerah, ini sudah diumumkan lulus. Teknis ini, sangat teknis dan susah mengingatnya. Lulus. Kemudian, kan ada masa sanggah itu ya. Ada masa sanggah. Masa sanggah ini tidak dimanfaatkan oleh peserta yang lain sampai habis masa sanggahnya. Sehingga, periode berikut tentu dia akan mengurus tahapan yang lain. Mungkin sudah mengurus administrasi untuk kesiapan SK dan lain-lain. Tiba-tiba karena tangan kekuasaan, kemudian ini dibatalkan. Secara kalau kita lihat kasat mata sih biasa, tapi kalau di daerah ini jadi politis, Bu. Apalagi, bupatinya pejabat.

Nah, hal-hal teknis seperti ini, itu tidak boleh alfa di tingkat bawah. Karena, dia bisa jadi rasis dan segala macam. Karena, secara keseluruhan biasa kan kalau kita jadi PPPK atau PNS itu, biasa kalau di kampung, itu sebuah kebanggaan. Sudah dia baca doa dan segala macam, tiba-tiba dianulir. Ini karena kelalaian panitia lokal yang membatalkan. Ini catatan. Ini penting. Jangan sampai dia berlaku di banyak daerah dan akan menyebabkan persoalan yang lebih rumit.

Kemudian dalam rangka penerimaan yang untuk tahun 2024, ini operator ini, Ibu/Bapak sekalian, ini orang yang sangat penting di dalam proses penerimaan. Dia bisa mengubah data Dapodik. Yang tadinya Dapodik kemudian diganti dengan orang baru. Bisa itu dilakukan. *Nah*, ini jangan, ini penguasa di daerah boleh melakukan itu, Bu, Bapak. *Nah*, jangan sampai terjadi. Karena biasa yang tereliminasi di dalam proses seperti ini, anak-anak petani yang dia tidak punya pengaruh apa-apa. Yang dia tidak punya akses terhadap informasi. Oleh sebab itu, kita jangan zalim untuk urusan begini-begini.

Ini banyak, saya ini pernah Anggota DPR Kabupaten/Kota, Ibu/Bapak sekalian. Jadi, saya tahu praktik seperti apa dilaksanakan pada saat penerimaan. Orang dia jualan di pasar, tiba-tiba dia terangkat. Dia bukan orang yang secara langsung jadi honorer di sebuah instansi, tiba-tiba dia jadi pegawai karena faktor kuasa di tingkat kabupaten/kota. Ini tidak boleh terjadi.

Nah, kemudian yang paling terakhir. Memang perubahan-perubahan tadi, ya, *eselonisasi* dan segala macam ini, saya belum tahu. Begitu diubah, kira-kira apa yang terjadi perubahan secara substansi di tingkat daerah?

Katakanlah, misalnya jadi WTP atau dari *disclaimer* kemudian dia jadi WDP, meningkat. Sebenarnya, apa sih perubahan yang signifikan yang terbaca akibat perubahan sistem seperti ini? Saya ingin tahu tolok ukurnya apa? Apakah kinerjanya lebih baik? Kalau ukuran pelaksanaan pemerintahan di daerah, apakah dia dari WDP tiba-tiba jadi WTP tahun kemudian atau apa?

Nah, ini, ini semua penting karena kadang-kadang, ya, namanya juga ASN di kabupaten. Kan kalau sudah jadi Eselon III kemudian dapat jabatan, itu kan ya dia ada nilailah di dalam keluarga. Tiba-tiba dia karena perubahan, dia tidak dapat jabatan apa-apa. Kendaraan pelat merah, kebanggaan juga itu kalau di daerah. Pakai pelat merah, waduh, tiba-tiba hilang karena perubahan ini. *Nah*, ini, ini menjadi penting.

Maksud Komisi II, jangan kita mengubah sesuatu yang juga efeknya juga tidak, tidak dominan, tapi mengubah secara dari semua faktor sosialnya berubah. Sementara, apa yang diinginkan itu juga tidak dicapai dengan baik. *Nah*, ini, ini penting agar kemudian sistem ini tidak berubah setiap saat.

Kemudian, memang KASN, ini agak rumit juga ini, Kang Ketua. Harus dipikirkan ini, mau Pilkada. Itu sudah mulai, Sekdanya sama camat sudah mulai *manggil nih* hari ini. *Nah*, kalau gawangnya enggak ada bagaimana? Itu problem.

514 kabupaten/kota Pilkada. Semua PNS akan, dia secara otomatis terlibat. Kita tidak perlu tutup-tutupi barang ini. Karena, itu. *Nah*, kalau penjaga gawang moralnya ini enggak ada itu problem. *Nah*, ini enggak. Mungkin ini sudah pasti jadi bagian dari kesimpulan untuk caranya diapakan kira-kira.

Mungkin itu. Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Shalom.

KETUA RAPAT (SAAN MUSTOPA, M.Si., WAKIL KETUA KOMISI II/F-P.NASDEM):

Waalaiikumsalam.

Terima kasih, Pak Kamran.

Silakan, Pak Bagus.

F-P.GOLKAR (A. A. BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA, M.H., M.Kn.):

Terima kasih, Pimpinan.

Pimpinan dan Anggota Komisi II yang saya hormati,

Mitra kerja yang hadir pada saat ini, ada MenPan-RB, sudah itu KASN, dan yang lainnya. Jadi, saya langsung saja. Saya langsung ke Pan-RB. Dan saya tidak, apa, ikut berbicara karena tadi sudah tentang anggaran. Apresiasi sudah anggota lain yang menyampaikan, saya tidak ikut mengambil ranah itu.

Yang pertama, saya sangat menyayangkan, Pak. Pak Menteri ke mana *ini*, Bu Sekjen?

KETUA RAPAT (SAAN MUSTOPA, M.Si., WAKIL KETUA KOMISI III/F-P.NASDEM):

Haji. Haji. Sudah izin. Sudah izin.

F-P.GOLKAR (A. A. BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA, M.H., M.Kn.):

Siap.

Jadi, saya selalu mengikuti apa yang disampaikan Pak Menteri di YouTube, bahwa bellau tidak ingin negara ini menjadi negara honorer. *Nah*, ini, hal ini sebenarnya saya secara pribadi menyayangkan Bu Sekjen, ya. Karena apa? Karena,

di dalam Pak Menteri mengambil kebijakan saat ini, menurut saya, tidak berasaskan keadilan.

Kenapa saya menyampaikan begitu? Karena, ada hal-hal yang tertinggal. Di mana nasib seseorang pekerja yang selama ini sudah mengabdikan hidupnya, itu puluhan tahun. Ada yang menjadi sopir, ada menjadi penyuluh bahasa Bali, penyuluh KB, dan juga penyuluh bahasa lainnya. Ini tertinggal.

Dan sebagaimana yang kita ketahui bahwa Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 mengisyaratkan adalah bagaimana keuangan ini kita laksanakan dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 23 ayat (1) ini nyaris terlupakan. Nyaris terkesampingkan. Ya, karena tidak mengacu bagaimana kita mengarah kepada kemakmuran rakyat Indonesia.

Di sini Bu Menteri, *eh* Bu Sekjen. Jadi, di penambahan anggaran ini, apakah enggak sebaiknya?

Ya, kalau kita melihat, ada benarnya pernyataan Pak, Pak Menteri, bahwa kita mempunyai stok mahasiswa Sarjana S1, S2 yang berkualitas. Betul, saya sependapat. Toh juga setiap tahun akan ada yang pensiun. Kenapa kita enggak berlakukan hal yang sama? Kita angkat dia sebagai honor dulu atau kontrak dulu. Yang kemudian begitu setiap tahun kita buka lagi, dialah yang menjadi peserta utama yang kita prioritaskan sebagai pendaftar di CPNS ataupun PPPK nantinya. *Nah*, jadi, sehingga kontrak-kontrak yang diangkat oleh Kepala Daerah, ini bisa terselesaikan.

Kalau saya hitung Bu Sekjen, mungkin siklusnya 10 sampai 20 tahun. Honor-honor yang diangkat selama ini tidak mempunyai parameter yang bagus, ini akan selesai. Jangan saat ini dikorbankan.

Apalagi, kami di Provinsi Bali khususnya, Bu. Saya, Adi Mahendra Putra, Anggota Fraksi Partai Golkar Dapil Bali. Sekarang Provinsi Bali sudah mempunyai Undang-Undang Nomor 15 di Tahun 2023.

Di Provinsi Bali banyak sekali warisan-warisan leluhur kami yaitu lontar-lontar. Di dalam menjaga Bali sebagai pariwisata yang berkelanjutan, kami sangat membutuhkan penyuluh bahasa Bali ini. Masih hidup dan ada di setiap desa, 716 desa yang ada di provinsi Bali. Berarti, kami butuh 716. Ini saja belum terisi, Bu. Semua desa belum terisi. Karena, keterbatasan di dalam menggali SDM ini.

Nah, di dalam upaya Pemerintah Provinsi Bali melengkapi kebutuhan ini, yang baru sekarang kurang lebih ada sekitar 679. *Nah*, ini tertinggal Bu. Kami mohon hendaknya di penambahan anggaran *nih*. Apakah sebaiknya penambahan ini Ibu perjuangkan? Sehingga, ini terakomodir. Sopir yang sudah belasan tahun mengabdikan, ini tolong diangkatlah itu. Sehingga, keadilan ini bisa terjadi di nusantara ini, ya. Sehingga, Pasal 23 ayat (1) ini benar-benar kita bisa laksanakan dengan baik.

Intinya, saya setuju. Penambahan anggaran ini Bu Sekjen, sangat setuju. Bila perlu ditingkatkan sehingga tidak ada lagi yang tertinggal dan asas keadilan ini bisa kita capai.

Itu kira-kira, Pimpinan, yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini.

Khususnya kepada KASN, ini sebenarnya saya secara pribadi sangat membutuhkan masih. Saya menganggap karena penerapan juga, di dalam anggaran yang ada di hasil dari APBD kita, sudah sangat jauh dari semangat Pasal 23 ayat (1) itu. Harus ada evaluasi. *Nah*, jangan ada hibah-hibah ini, justru akan menyengsarakan, memberikan pembodohan kepada masyarakat. Di mana kembali hibah ini bersifat partisipatif oleh pemerintah. Ini sebenarnya yang harus dilaksanakan.

Sekian. Terima kasih.

Wa billahi taufiq wal hidayah.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Om Shanti, Shanti Shanti Om.*

KETUA RAPAT (SAAN MUSTOPA, M.Si., WAKIL KETUA KOMISI II/F-P.NASDEM):

Terima kasih, Pak Bagus.

Terakhir, Pak Amin.

F-P.NASDEM (AMINUROKHMAN, S.E., M.M.):

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat sore,
Salam sejahtera untuk kita sekalian,

**Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi II,
Yang saya hormati Sesmen Pan-RB, Kepala BKN, dan
KASN bersama seluruh jajaran,**

Pertama, saya memberikan catatan kaitan dengan anggaran dulu. Pan-RB, kalau dari paparan tadi, mengusulkan tambahan anggaran 290 miliar sekian, ya. Kemudian, dari sisi kebijakan yang sudah dirumuskan dalam rencana program dan sebagainya, pada prinsipnya, kami dari Komisi II memberikan dukungan itu. Namun demikian, program ke depan Pan-RB ini, bagaimana bisa mewujudkan visi misi yang sudah sering kita terima dalam setiap paparan? Namun demikian, di dalam implementasinya, di dalam pemerintahan, masih kami anggap belum bisa memberikan satu, satu target yang pasti, ya.

Salah satu yang paling kita tunggu sebetulnya RPP yang sedang disepakati dengan Komisi II. Ini sebetulnya harus segera beres, Bu. Tapi, sampai hari ini, ini juga belum. *Nah*, apa korelasinya dengan semua itu? Karena ini menyangkut kebijakan strategis di Kementerian Pan-RB. Jangan sampai terhambatnya RPP yang belum rampung ini membuat rencana-rencana strategis dan target-target yang sudah

disepakati itu tidak tercapai. Itu saja menjadi catatan saya kaitan dengan anggaran ke depan, ya.

Kemudian kalau dari sisi penyerapan, menurut saya masih pada hal yang patut kami bisa *maklumi*. Namun demikian, percepatan di dalam penyerapan anggaran dalam realisasi program, Ibu Sesmen bisa melakukan optimalisasi itu, ya.

Kemudian, yang berikutnya BKN. BKN ini anggaran yang tahun 2023 itu 1 triliun. Betul ya, Pak, ya? 1 triliun 79 miliar sekian. Angka ini menurut saya cukup, cukup besar karena memang ini ada kaitannya dengan program-program rekrutmen ASN, kemudian PPPK, dan lain sebagainya. Tentunya, ini ada koreksi yang perlu saya sampaikan kaitan dengan anggaran 2023. Ini di halaman 8 Pak, kaitan dengan capaian program prioritas nasional tahun 2023. Halaman 8 yang ini, ya. Itu di poin nomor 2 dan nomor 3.

Itu ada capaian yang luar biasa fantastis menurut saya. Dari target 100%, tercapai 161%. Ini salah asumsi waktu merencanakan atau memang ini ada upaya-upaya inovasi yang dilakukan? Karena anggarannya enggak berubah, tapi target capaiannya sampai 161%. Berarti 61% itu didukung anggaran apa enggak? Logikanya begitu saja. Jadi, kalau anggarannya enggak berubah, tapi capaiannya melebihi 50% ya, itu model inovasinya seperti apa?

Jadi poin 2 dan 3, itu yang satu 161,2% dan yang satunya 141,1%. Ini BKN ya, Pak. ya. Jadi, di situ ada pemetaan penilaian potensi dan kompetensi ASN, penerapan sistem informasi, dan sebagainya.

Anggarannya enggak berubah, ya. Kalau memang ini bagian dari kreativitas dan inovasi, ya, kami apresiasi. Tapi, jangan sampai salah mengasumsi rencana awal begitu *loh*, Pak. Ya, kalau ada kelebihan 2%, 4%, okelah. Ini lebih dari 50%. *Nah*, ini menjadi catatan ke depan biar ini enggak menjadi pertanyaan begitu *loh*. Jangan-jangan memang anggarannya sekian sudah cukup ya *toh*?

Kok, kok ini bisa mencapai target yang lebih, ya? Ini perlu menjadi koreksi kita semua bahwa semua program yang disajikan dalam data, ada rasionalisasi yang perlu kita pikirkan bersama.

Yang berikutnya, terkait dengan BKN. Dalam kebijakan ke depan, dari semua program yang sudah kita terima, data dan program yang sudah terealisasi pada prinsipnya, kami akan dukung BKN tetap eksis dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga negara. Meskipun, di dalam di dalam Undang-Undang ASN yang terbaru, itu ke depan perannya memang ini harus terintegrasi dalam satu, satu Kementerian Pan-RB. Ini perlu kita, apa, dalam nanti pada saat pembahasan anggaran tahun 2025. Karena, ini masa transisinya. Dan RPP ini, kalau tidak terbit sampai dengan akhir jabatan periode ini, ya, kita enggak bisa bayangkan kendala-kendala lapangan yang akan terjadi.

Kemudian, yang berikut dari KASN.

Ini yang bocor apa ini?

Ya, KASN dari paparan tadi, KASN ini sebetulnya lembaga yang masih, masih kita beri ruang di dalam undang-undang itu, Pak. Tapi peran-perannya sampai dengan April, sebagaimana yang Bapak sampaikan tadi. Ini belum bisa bekerja secara maksimal karena memang ada ketentuan-ketentuan itu. Termasuk anggaran Pak. Ya, di mana ada lembaga yang harus menjalankan tupoksi-nya, tapi tidak teralokasi anggaran, ya. *Lah* ini akan menjadi masa transisi lagi. Tadi yang, yang sebelumnya itu, ada juga lembaga yang juga nomenklatur programnya ada, tapi anggarannya nol, ya.

Nah, kalau ini, KASN ini ada catatan yang tadi sudah disampaikan, tidak mengajukan pembukaan blokir anggaran sebagaimana dimaksud. Berarti, Bapak selama ini menjalankan program itu tanpa didukung anggaran ya, Pak, ya? Setelah bulan April? Ya, ini nanti tolong dijelaskan Pak, ya.

Jadi, kami dari Komisi II, hal-hal yang seperti ini dalam masa transisi ini, jangan sampai ya ada pembiaran yang pada akhirnya kita, Komisi II, menghadapi satu problem. Karena KASN ini, yang sebelum-sebelumnya dari daerah kabupaten/kota, yang akan menduduki jabatan dan sebagainya itu kan harus mendapatkan *asesment* dari KASN. *Lah* mau menjalankan itu, anggarannya enggak ada. *Lah*.

Hal-hal yang seperti ini ya kiranya dipikirkan ke depan. Kalau transisinya ini sampai dengan bulan, bulan April, ya, setelah itu bagaimana? Karena di Pan-RB juga tidak muncul di situ nomenklatur anggarannya karena masih dianggap berada pada posisi di lembaga sebelumnya.

Oleh karena itu, Pimpinan, transisi Undang-Undang ASN ini perlu didiskusikan lebih dalam pada saat pembahasan anggaran.

Saya kira itu, Ketua.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (SAAN MUSTOPA, M.Si., WAKIL KETUA KOMISI II/F-P.NASDEM):

Terima kasih, Pak Amin. Saya rasa cukup ya.

**Bapak/Ibu sekalian,
Anggota Komisi II DPR RI yang saya hormati,**

Terus juga dari,

**Sesmen Pan-RB,
Kepala BKN, dan
Ketua KASN,**

Karena ini masih rapat pendahuluan, dan ini juga masih pagu indikatif ya, dan nanti kita akan ada pembahasan berikutnya, saya memohon untuk Sesmen Pan-RB,

maupun Kepala BKN, Ketua KASN yang terkait dengan masukan, terus juga catatan-catatan, serta saran dari Para Anggota Komisi II untuk bisa dicatat. Yang nanti jadikan bahan untuk pembahasan berikutnya.

Yang kedua, yang terkait dengan pertanyaan-pertanyaan dari para Bapak/Ibu Anggota Komisi II DPR RI, juga nanti disiapkan jawaban tertulisnya sebagai bahan untuk rapat lanjutan yaitu pada pembahasan RAPBN tahun 2025. Nanti, dilakukan konsinyering.

Terkait dengan KASN juga nanti kita akan lakukan pembahasan secara khusus, terutama ketika kita nanti ada Rapat Kerja atau Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI.

Dengan demikian kita lanjutkan Rapat ini dengan kesimpulan.

Bisa ditampilkan?

Kesimpulan Rapat Kerja atau Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara.

1. Komisi II DPR RI telah menerima penjelasan dari Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian Pan-RB), Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), sebagai berikut:
 - a. Kementerian Pan-RB
 - Realisasi APBN tahun 2023, sebesar Rp315.957.346.358,00, dari pagu alokasi anggaran tahun 2023 sebesar Rp320.334.025.000,00 atau sebesar 98,62%;
 - Realisasi APBN tahun 2024 per 10 Juni 2024 sebesar Rp132.826.630.117,00 dari pagu alokasi anggaran tahun 2024, sebesar Rp378.049.699.000,00, atau sebesar 39,64%;
 - Pagu indikatif RAPBN tahun 2025 sebesar Rp359.980.127.000,00.
 - b. BKN
 - Realisasi APBN tahun 2021, maaf, realisasi APBN tahun 2023 Rp1.029.852.541.554,00 dari pagu alokasi anggaran tahun 2023, sebesar Rp1.079.227.170.000,00, atau sebesar 95,43%;
 - Realisasi APBN tahun 2024 per 31 Mei 2024 sebesar Rp344.411.610.154,00 dari pagu alokasi anggaran tahun 2024, sebesar Rp783.765.194.000,00, atau sebesar 43,94%;
 - Pagu indikatif RAPBN tahun 2025 sebesar Rp798.342.991.000,00.
 - c. KASN
 - Realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp52.607.509.465,00 dari pagu alokasi anggaran tahun 2023, sebesar Rp53.802.468.000,00, atau sebesar 97,78%.
 - Realisasi APBN tahun 2024 per 10 Juni 2024 sebesar Rp25.534.999.876,00 dari pagu alokasi anggaran tahun 2024, sebesar Rp44.796.293.000,00, atau 57%.

Wf

- Pagu Indikatif RAPBN-nya enggak ada, ya? 2025?
- 2. Terhadap usulan tambahan anggaran yang diusulkan oleh Kementerian Pan-RB dan BKN sebagai berikut:
 - Usulan tambahan anggaran tahun 2025, Kementerian Pan-RB sebesar Rp290.000.162.000,00.

Benar ya, Ibu, ya?

- Usulan tambahan anggaran tahun 2025 BKN sebesar Rp59.465.087.000,00.

Komisi II DPR RI akan membahas secara mendalam pada RDP yang akan datang.

- 3. Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian Pan-RB, BKN, KASN untuk segera menyampaikan alokasi anggaran tahun 2023 dan alokasi anggaran tahun 2024 beserta rinciannya, sesuai dengan jenis belanja dan kegiatan atau satuan tiga, serta target dan capaian kinerja kepada Sekretariat Komisi II DPR RI sebagai bahan pendukung Rapat Pembahasan RAPBN tahun 2025 yang akan datang.

Setuju ya, kesimpulannya?

Ya. Kenapa Bu?

SEKRETARIS KEMENTERIAN Pan-RB RI (RINI WIDYANTINI, S.H., MPM.):

Izin Pak, yang di angka 1, ada kesalahan angka, Bapak.

KETUA RAPAT (SAAN MUSTOPA, M.Si., WAKIL KETUA KOMISI II/F-P.NASDEM):

Oh, yang mana?

SEKRETARIS KEMENTERIAN Pan-RB RI (RINI WIDYANTINI, S.H., MPM.):

Iya di angka 1 huruf a, Pak.

KETUA RAPAT (SAAN MUSTOPA, M.Si., WAKIL KETUA KOMISI II/F-P.NASDEM):

Realisasi APBN?

SEKRETARIS KEMENTERIAN Pan-RB RI (RINI WIDYANTINI, S.H., MPM.):

Realisasi 2023 bukan 132 tapi seratus, 149 miliar. 149 itu. 13-nya ganti. 149.840

KETUA RAPAT (SAAN MUSTOPA, M.Si., WAKIL KETUA KOMISI II/F-P.NASDEM):

Coba dicatat itu.

SEKRETARIS KEMENTERIAN Pan-RB RI (RINI WIDYANTINI, S.H., MPM):

RP149.840.466.429,00

KETUA RAPAT (SAAN MUSTOPA, M.Si., WAKIL KETUA KOMISI II/F-P.NASDEM):

Realisasi tahun 2024, ya?

SEKRETARIS KEMENTERIAN Pan-RB RI (RINI WIDYANTINI, S.H., MPM):

Eh *sorry*, 2024. Betul Pak, ya. Demikian, Pak.

KETUA RAPAT (SAAN MUSTOPA, M.Si., WAKIL KETUA KOMISI II/F-P.NASDEM):

Sudah benar, ya? *Setujuin* ya?

(RAPAT : SETUJU)

Dengan demikian, Pimpinan mengucapkan terima kasih.

KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA (PROF. DR. AGUS PRAMUSINTO, M.D.A.):

Mohon maaf Pak, Pak Pimpinan.

Untuk yang terakhir, untuk memastikan saja, posisi kami seperti apa. Karena, KASN yang terakhir.

KETUA RAPAT (SAAN MUSTOPA, M.Si., WAKIL KETUA KOMISI II/F-P.NASDEM):

Oh, itu. Enggak ada itu. Yang ketiganya, apa yang-

KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA (PROF. DR. AGUS PRAMUSINTO, M.D.A.):

Kalimat terakhir.

KETUA RAPAT (SAAN MUSTOPA, M.Si., WAKIL KETUA KOMISI II/F-P.NASDEM):

Coba terus. Buka terus.

KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA (PROF. DR. AGUS PRAMUSINTO, M.D.A.):

Terus, terus. Paling bawah tadi.

KETUA RAPAT (SAAN MUSTOPA, M.Si., WAKIL KETUA KOMISI II/F-P.NASDEM):

Terus, terus.

KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA (PROF. DR. AGUS PRAMUSINTO, M.D.A.):

Nah, ini yang dimintai anggaran tahun 2025.

KETUA RAPAT (SAAN MUSTOPA, M.Si., WAKIL KETUA KOMISI II/F-P.NASDEM):

Eenggak, eenggak ada itu. Itu salah. Itu makanya eenggak dibacakan tadi sama saya.

KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA (PROF. DR. AGUS PRAMUSINTO, M.D.A.):

Oke ya. Berarti harus dihapus itu, ya

KETUA RAPAT (SAAN MUSTOPA, M.Si., WAKIL KETUA KOMISI II/F-P.NASDEM):

Itu dihapus *tuh*. Itu apa? Gilang, Sekretariat, *tuh*. Itu kan nggak saya bacakan tadi.

F-... (...):

Batas waktunya eenggak ada Ketua? Diberikannya kapan?

KETUA RAPAT (SAAN MUSTOPA, M.Si., WAKIL KETUA KOMISI II/F-P.NASDEM):

Kalo yang ini sih, yang apa, KASN, ini kan yang kita minta 2023, 2024. Jadi, tetap kita akan minta itu. Bukan untuk pembahasan 2025, ya. Itu jadi untuk KASN, ya.

Dengan demikian rapat kita bisa akhiri.

F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Sebelum ditutup Ketua, untuk mengingatkan kembali. Kan banyak pertanyaan-pertanyaan yang diajukan untuk dijawab seca, secara tertulis.

KETUA RAPAT (SAAN MUSTOPA, M.Si., WAKIL KETUA KOMISI II/F-P.NASDEM):

Sudah, sudah tadi disampaikan.

F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Untuk mengingatkan saja.

KETUA RAPAT (SAAN MUSTOPA, M.Si., WAKIL KETUA KOMISI II/F-P.NASDEM):

Iya, untuk mengingatkan. Jadi, Pimpinan sudah menekankan untuk pertanyaan dijawab tertulis. Untuk masukan dan catatan, harap dicatat dengan baik untuk bahan kita pembahasan berikutnya.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 14.37 WIB)

a.n. KETUA RAPAT
KABAG SET. KOMISI II DPR RI



Dahliya Bahnan, S.H., M.H.
197504202002122002